



Pemkot Memburu PKL dan Jukir Nakal

Sambungan dari hal 1

Yang terbaru, seorang warganet dengan akun @aulroket mengunggah konten pada aplikasi Tiktok, terkait keluhan mahalnya harga pecel lele di kawasan Malioboro yang dinilainya dibandrol tidak masuk akal. Harga pecel lele Rp 20 ribu, belum termasuk sama nasi. Ditambah nasi putih seharga Rp 7 ribu. "Ternyata *gaes* biasanya kita makan pecel lele itu harusnya udah ada lalap. Mau pesan lalap, itu nambah Rp10 ribu. Apakah *gue* terjebak dalam satu tempat ini atau semuanya seperti ini enggak tahu, kenapa kapitalis banget," tuturnya dalam video. "Parah,,, parah," seorang rekannya menyaut.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) langsung menyiapkan sanksi tegas. Salah satunya menutup selamanya pedagang pecel lele tersebut jika benar adanya menarik tarif di luar kewajaran. Tapi dia meminta informasi lokasi kejadian di mana dan kapan peristiwanya ke Pemkot Jogja. "Sudah kebijakan sejak awal, siapapun yang menarik harga tidak sesuai ketentuan dan tidak normal harganya, maka saat itu juga ditutup dan tidak boleh jualan selamanya di Malioboro," katanya kemarin (26/5).

HP menyebut oknum yang demikianlah yang dapat merusak nama Malioboro dan Kota Jogja. Menurut dia, untuk mengantisipasi kejadian *nuthuk rega* yang terjadi sebelumnya, sudah disepakati untuk memasang tarif harga. Daftar harga makanan

sudah menjadi kesepakatan seluruh pedagang dan komunitas di Malioboro. Pihaknya meminta semua komunitas dan pedagang menertibkan anggotanya manakala ada yang menyeleweng dari aturan. "Tidak hanya harga-harga makanan, petugas parkir atau lainnya, sudah menjadi kebijakan, akan ditindak tegas," imbuhnya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Cagar Budaya Ekwanto sudah memastikan lokasi pecel lele tersebut bukan berada di kawasan Malioboro. Itu karena pihaknya bersama komunitas sejak H-3 pra-Lebaran sudah melakukan verifikasi PKL yang ada di kawasan Malioboro. Semuanya sudah memasang daftar harga. "Jadi yang viral itu kemungkinan jajanya bukan di Malioboro, hanya nyebutnya di Malioboro," tuturnya.

Dari penelusurannya, termasuk melihat video tersebut, kemungkinan lokasinya berada di Jalan Perwakilan. Terkait hal itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kemantren Dandurejan, yang memiliki otoritas mengurus PKL di wilayahnya. Dalam kesempatan itu, mantan Lurah Prawirodirjan itu pun kembali mengajak wisatawan menjadi pengunjung Malioboro yang cerdas. Dengan memastikan apakah PKL memasang daftar harga. Termasuk menanyakan ke PKL. "Kalau tidak ada jajan di situ, atau kalau mematok harga di atas daftar harga, segera laporkan ke kami," pintanya. Anggota Forum Pemantau In-

dependen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba mengatakan, *nuthuk rega* makanan semacam penyakit tahunan yang kerap terjadi dan hingga saat ini tidak ada efek jera. Terbukti, fenomena *nuthuk* harga makanan terjadi lagi dan lagi. "Kesannya sanksi selama ini dengan menutup sementara warung lesehan yang *nuthuk* harga, sifatnya sementara tidak permanen. Sehingga dimungkinkan hal tersebut (*nuthuk*) kembali terulang," katanya.

Menurutnya, *nuthuk* harga makanan termasuk *nuthuk* tarif parkir jelas merusak citra Kota Jogja sebagai kota wisata. Dia meminta pemkot bisa memastikan di lokasi wisata manapun tak ada praktik *nuthuk rega*. Tak hanya di kawasan Malioboro. Sanksi tegas harus dilakukan dapat berupa misalnya bantuan sosial dicabut. "Dengan catatan perbuatannya (*nuthuk*) dilakukan secara berulang selama tiga kali," tambahnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja Wahyu Hendratmoko mengatakan, pasca-fenomena yang muncul di medsos itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan OPD terkait Dinas Kebudayaan terkait adanya intervensi untuk mengatasi persoalan *nuthuk* di Kota Jogja yang kerap terjadi. Karena kawasan malioboro itu masuk dalam pembinaan UPT kawasan budaya di bawah koordinasi dari Dinas Kebudayaan kota Jogja. "Sebenarnya penerbitan kewajiban daftar menu dan harga itu juga sudah terus dilakukan teman-teman UPT," katanya. (wia/pr/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005